



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMANSYAH
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 494279

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.962.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/255 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.610.000.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 82.500.000
3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, WARISAN Rp. 135.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, WARISAN Rp. 105.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **425.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000



5. MOTOR, KAWASAKI NINJA R Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	129.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	190.221.956
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.707.721.956
III. HUTANG	Rp.	134.558.520
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.573.163.436

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.